

PEMERINTAH REVISI PERDA RTRW

Ciptakan Iklim Investasi Kondusif Cepat dan Murah

WONOSARI (KR)- Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat dan murah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Revisi tersebut sekarang sudah dalam pembahasan lintas sektor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN.

Sementara untuk menyongsong hasil revisi tersebut, sekarang sudah disusun 7 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan harapan, setelah revisi perda disahkan langsung dapat dioperasional-

kan dengan RDRT yang sudah disiapkan. Setelah Perda RTRW dan RDTR terwujudkan akan diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS) , yaitu sistem perizinan berusaha secara elektronik. iDengan sitem ini masyarakat dan investor lebih mudah, cepat dan murah dalam mengurus perijinan,i kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Fajar Ridwan SP MSi, Rabu (15/1).

Selain dalam rangka merangsang dunia usaha, revisi ini dilakukan karena Perda RTRW sudah ber-

usia lima tahun, dan ada perubahan mendasar pada peraturan menteri ATR nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan substansi RTRW Propinsi, Kabupaten, kota dan RDTR. Revisi ini merupakan kebutuhan antisipatif dan reaktif terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat strategis. Kebutuhan peningkatan kebergunaan RTRW, dalam kebijakan, jalan strategis nasional, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan penetapan lahan sawah yang dilin-

dungi (LSD).

Adapun jenis kawasan yang direvisi meliputi, KawasanLindung, KawasanBadan Air, KawasanHutan Lindung, KawasanKeunikan Batuan dan Fosil,Kawasan Keunikan Proses Geologi, Kawasan Perlindungan Setempat, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Kawasan Budidaya, KawasanTanaman Pangan, Kawasan Hortikultura. Sedangkan yang sekarang RDTR yang sudah disusun, terbagi dua, sudah peraturan bupati, RDTR Kawasan Siung Wedi-ombo dan Pantai Selatan (pansela) bagian Timur . Selanjutnya masih da-



KR-Endar Widodo

Kawasan Pantai Selatan (Pansela) ini sudah masuk dalam RDTR setelah revisi Perda RTRW ditetapkan.

lam draf, RDTR Pansela Bagian Barat, Wilayah Agung wilayah Timur. Bagian Tengah, Pansela perkotaan dan Batur (Ewi)-f

DIKOORDINASIKAN PENEGAK HUKUM

Kasus Natah Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD

WONOSARI(KR)- Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Gunungkidul mengaku sedang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paska demonstrasi sebagian warga Natah yang meminta ada tindakan terhadap kepala desanya.

“Sekarang sedang pengumpulan masalah, mencocokkan data pengaduan masyarakat dan kondisi di lapangan,” kata Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kalurahan (DPMKPPKB) Kabupaten Gunungkidul Kriswanto SST MM,



KR-Endar Widodo

Kriswanto SSTP MM

Rabu (15/1).

Sesuai dengan rekomendasi serta arahan pimpinan, pihaknya sedang melakukan konfirmasi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 dan 2024. Terlebih sesuai dengan pengaduan ke DPRD adanya dugaan penyimpangan pembangunan taman dan Bendungan yang informasinya menyimpang dari rencana yang sudah

disusun. Materi pengaduan ke dewan lainnya, pemerintah kelurahan dinilai tidak transparan, nepotisme dan sebagainya. Sementara Kepala Inspektori Daerah (Irda) Kabupaten Gunungkidul Saptoyo SIP MSi mengaku kasus tersebut sedang dalam proses penanganan. Karena masalah ini juga dilaporkan ke penegak hukum, Irda sedang melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Sebagaimana diketahui dalam kasus ini Bupati sudah menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Inspektur Daerah (Irda), DPMKPPKB, Bagian Hukum dan Kapanewon Nglipar untuk menangani sesuai dengan porsi masing-masing. (Ewi)-f

KONSULTASI PUBLIK RKPD

Tingkatkan Layanan dengan Teknologi

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta membuka pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (14/1). Dalam kesempatan tersebut H Sunaryanta menyatakan di eras digitalisasi ke depan dalam reformasi birkrasi agar mampu meningkatkan pelayanan. iTermasuk layanan masyarakat dengan beradaptasi dengan perkembangan teknologi,i kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta.

Kegiatan dihadiri Kepala Bappeda Ni Made Dwipanti Indrayanti, perwakilan Forkopimda serts instansi terkait. Diungkapkan, dengan adanya pemikiran, ide gagasan yang luar biasa dalam ku-

run waktu tertentu kedepan khususnya di tahun 2026 kedepan perkembangan Gunungkidul semakin baik.

“Tentu internal didalam tata kelola pemerintah, masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang lebih profesional. Termasuk adaptasi teknologi terus didorong karena kecepatan dan akselerasi di zaman sekarang menjadikan masyarakat semakin mu-

dah mengkases layanan,” ujarnya.

Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta menjelaskan beberapa hal yang menjadi rencana proyeksi kedepan. Salah satunya telah menetapkan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2045 yang menjadi landasan arah visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

(Ded/Ewi)-f



KR-Dedy EW

Pelaksanaan konsultasi publik.

TINGKATKAN PELAYANAN

Bupati Resmikan Armada Pemadam Kebakaran

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta meresmikan armada kebakaran di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (14/1). Sebanyak 4 unit armada kebakaran diresmikan untuk mendukung penanggulangan bencana kebakaran. i Pengadaan armada baru ini merupakan bentuk nyata dari

peningkatan pelayanan publik. Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme pelayanan,i kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta.

Diungkapkan, peningkatan sarana prasarana dinas, salah satunya BPBD pada unit pemadam kebakaran merupakan upaya pemerintah dalam terus melayani masyara-

kat. Tentu pemkab memberikan apresiasi atas kinerja unit pemadam kebakaran di BPBD, sehingga bisa melakukan penanggulangan kebakaran di wilayah Gunungkidul. “Penambahan sarana prasarana ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan di masyarakat,” ujarnya.

Peresmian ditandai pemecahan kendi oleh Bupati Gunungkidul H Sunaryanta. Juga dilaksanakan dimulasi dalam penanganan bencana kebakaran. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Endang Sri S, Dandim 0730 Letkol Inf Rony Herman, Kapolres AKBP Ary Murtini SIK, Sekda Sri Suhartanta, Kepala BPBD Purwono dan kepala dinas terkait.

(Ded)-f



KR-Dedy EW

H Sunaryanta meresmikan armada pemadam kebakaran.

DIBUANG DI LAHAN KOSONG

DLH Surati Warga Penampung Sampah Ilegal

WONOSARI (KR)6Pembuangan sampah ilegal diduga berasal dari luar Gunungkidul di Kapanewon Patuk mendapat teguran keras Dinas Lingkungan Hidup (DLH).Kepala DLH Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, mengatakan pihaknya telah mendatangi lokasi tempat pembuangan sampah tersebut di Padukuhan Sumbertetes beberapa waktu silamuntuk memeriksa aktivitas di tempat tersebut. “Kami sudah memberi teguran dan jika tetap nekat dengan memfasilitasi pembuangan sampah ilegal kami akan mengambil tindakan,” katanya.

Tempat Pengolahan Sampah (TPS) ilegal di Sumbertetes, Patuk tersebut tidak hanya menyalahi aturan. Tetapi juga dikehentikan oleh warga sekitar karena menimbulkan polusi dan bau tak sedap. Padahal volume pembuangan sampah tersebut betransung setiap hari dan merupakan sampah ru-

mah tangga juga berasal dari warung-warung. Karena keberadaannya ilegal dan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan warga maka teguran keras ini diharapkan segera dihentikan. “Kami akan terus awasi jangan sampai pe.buanhan sampah ilegal ini berlanjut,” ujarnya. Terpisah Anggota DPRD

Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti mengatakan, komitmen pemkab untuk mengatasi persoalan sampah dinilai sudah baik. Hal itu terlihat dari sejumlah program yang dijalankan untuk memastikan tidak ada masalah berkaitan dengan sampah. Meskipun demikian, pihaknya juga mengakui, tu-

gas pemkab tidak hanya memastikan pengelolaan berjalan dengan baik. Namun, juga ada upaya mengajak partisipasi warga sehingga penanganan bisa lebih optimal. “Program untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan,” katanya.

Selain itu ia juga menekankan adanya sejumlah hutan dutemukan tumpukan sampah diantaranya kawasan hutan Mojojerit, Paliyan-Jetis, Sapto-sari atau di Paliyan-Banyusoco, Playen.

“Semestinya tidak boleh dibuang sembarangan dan warga harus diberikan pemahaman ini,” terangnya. (Bmp)-f

3.000 Vaksin Dibagikan untuk 6 UPTD Puskesmas

WONOSARI(KR)- Upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pengendalian dan pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) terus dilakukan. Selain melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pengobatan ternak yang sakit, mengubur dengan benar sapi yang mati, sekarang tambah amunikasi baru untuk melakukan pencegahan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dipeterkeswan) menerima bantuan 3.000 dosis vaksin dan Kementerian Pertanian Republik Indoneisa. “Vaksin ini segera dibagikan kepada 6 Unit Pelaksdana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas),” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Wibawanti Wulandari SP, Rabu (15/1).

Sebelumnya sudah divaksinakan 375 vaksin dari bantuan Pemda DIY, sekarang bertambah 3.000 vaksin dari Kementerian Pertanian dan segera digencarkan gerakan vaksinasi untuk hewan yang masih sehat. Masing-masing UPTD Puskesmas akan mendapatkan 500 dosis vaksin, dengan jumlah tenaga medis, paramedis dan petugas totalnya 40 orang. Diingatkan, ke depan peternak diharapkan meningkatkan kesadaran pentingnya vaksinasi. Sebab, ternak yang sudah divaksin keta-



KR-Endar Widodo

Vaksinasi pencegahan penularan PMK di Gunungkidul terus berlanjut.

hanannya akan meningkat. Kewajiban vaksinasi ini juga tertuang dalam SE Nomor 6 Tahun 2025 tersebut antara lain mewajibkan masyarakat peternak untuk melakukan vaksinasi terhadap ternaknya yang berada di wilayah ring vaksinasi, sebagai upaya pengendalian penyakit hewan. Selain vaksinasi bupati juga meminta, peningkatan pengawasan pasar hewan. Ternak keluar masuk pasar hewan diwajibkan untuk membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Melarang penjualan bangkai ternak,konsumsi ternak sakit atau mati (purak/-

brandu), serta memberikan peringatan bagi penjual maupun pembeli bangkai ternak. Mewajibkan penguburan ternak mati sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit yang lebih luas. Mengintensifkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada berbagai lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran masyarakat akan bahaya penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) lainnya. (Ewi)-f

PERDA 2010 SUDAH TAK RELEVAN

Pengawasan Minuman Beralkohol Akan Direvisi DPRD

WONOSARI (KR)— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol menyikapi tingginya kasus peredaran minuman beralkohol (Mihol) di Kabupaten Gunungkidul. Langkah yang dilakukan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran minumsn keras.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

DPRD Gunungkidul, Ery Agustin membenarkan bahwa inisiatif revisi ini merupakan langkah proaktif masalah terjadi berkaitan dengan minuman keras.

“Kondisi saat ini penjualan miras semakin mudah, karena itu perlu ada pembaruan regulasi untuk menanggulangi,” ujarnya.

Diakuinya untuk saat ini bahwa Perda No. 4/2010 sudah tidak relevan lagi sehingga dalam penegakan perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering menghadapi kendala terkait peredaran minumsn

keras lantaran belum memiliki kewenangan yustisi yang jelas.

Padahal miras telah menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya gangguan kamtibmas termasuk kecelakaan lalu lintas dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Karena itu perlunya tindakan tegas dari penegak hukum untuk meminimalisir dampak negatif dari peredaran miras di Gunungkidul.

“Upaya Revisi Perda ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan

zaman,” imbuhnya.

Selain menyngkut efek jera juga diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol.Dengan adanya perubahan ini, DPRD Gunungkidul berharap upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya peredaran minuman beralkohol yang dikhawatirkan akan semakin tidak terkendali sejalan dengan perkembangan waktu dan zaman (Bmp)-f